

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan topik yang sering muncul dalam pembahasan isu global. HAM mencakup pemenuhan hak-hak dasar manusia, namun sekarang semakin terspesifikasi seperti salah satunya hak kesetaraan gender dengan isu *Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, Sex Characteristic* (SOGIEC).

Menurut Pram, istilah SOGIESC merujuk pada identitas lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan queer (LGBT) secara inklusif. Kelompok LGBT sendiri merupakan kelompok minoritas yang rentan terhadap tindakan diskriminatif.¹

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikan ini sebagai salah satu agenda dalam isu HAM dan politik kesehatan global.² Pembahasan isu HAM LGBT dalam Ilmu Hubungan Internasional (HI) pertama kali dibahas oleh Hagland tahun 1997. Paul memperhatikan isu LGBT dalam ranah HAM sebagai isu global. Dalam tulisannya, Hagland menyatakan bahwa:



Any attempt to conceptualize the political in relation to LGBT identities, and LGBT politics in relation to human rights discourse, would therefore seem to suggest at least three important questions: first, how is the domain of the political constituted in international relations discourse? Second, what are human rights in this discourse? And third, who can be a subject of such rights?

¹ Pram. "Mari Kita Pahami Pengertian dari SOGIESC." Pitamerah.org. Diakses 9 Juni 2024. <https://pitamerah.org/2024/05/05/sekilas-mengenai-sogiesc/>.

² Pram. "Mari Kita Pahami Pengertian dari SOGIESC", Pita Merah, diakses 9 Juni 2024, <https://pitamerah.org/2024/05/05/sekilas-mengenai-sogiesc/>.

³ Paul EeNam Park Hagland, "International Theory and LGBT Politics: Testing the Limits of a Human Rights-Based Strategy," *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies* 3, no. 4 (1997): 357–384.

Hagland menyatakan bahwa ada tiga hal yang patut dijawab untuk mengkonsepkan secara politik hubungan HAM LGBT sebagai isu HAM yaitu dari segi pembentukan domain politik secara hubungan internasional, HAM yang terdapat dalam HAM LGBT dan subjek dari HAM LGBT. Isu ini juga dibahas oleh Cynthia Weber seorang profesor dalam HI di Universitas Sussex dalam bukunya “*Queer International Relations*”. Dalam karyanya Weber menyatakan adanya pergantian makna dari *queer* dari konotasi negatif menjadi positif yang disimpulkan oleh Weber “*Perverved Homosexual and Normal Homosexual*” di konteks politik internasional.⁴

Negara-negara di dunia mempunyai respon yang berbeda dalam menanggapi isu HAM LGBT, dan respon ini terbat dari ada atau tidak adanya proteksi hukum pada kelompok LGBT di negara tersebut. Berikut peta dunia yang menggambarkan respon negara terhadap HAM LGBT



Gambar 1.1: Peta Proteksi Hukum Diskriminasi LGBT⁵

Sumber: Equaldex: Discrimination Index

⁴ Cynthia Weber, *Queer International Relations: Sovereignty, Sexuality and the Will to Knowledge*, ed. Ann Tickner, J and Laura Sjoberg, *International Affairs*, vol. 93 (New York: Oxford University Press, 2017), 104-105.

⁵ “Peta Proteksi Hukum LGBT di Dunia” Equaldex. Diakses 9 Juni 2024. <https://www.equaldex.com/>

**Tabel 1.1:
Proteksi Hukum Diskriminasi HAM LGBT**

No	Warna	Jumlah Negara	Keterangan
1	Hijau	59	Memiliki proteksi hukum (mengakui HAM LGBT)
2	Merah	64	Tidak memiliki proteksi hukum (tidak atau belum mengakui HAM LGBT)
3	Biru	36	Proteksi hukum dalam aspek tertentu (dalam proses pengakuan HAM LGBT)
4	Putih	2	Ambigu terhadap pengakuan HAM LGBT.

Sumber: *Equaldex: Discrimination Index*

Berdasarkan Gambar 11.1 dan Tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa ada negara yang mengakui, tidak mengakui, belum mengakui, dalam proses dan respon ambigu terhadap pengakuan HAM LGBT. Tapi negara memiliki alasan dan kondisi tersendiri terhadap penerimaan HAM LGBT. Salah satu negara dalam proses penerimaan HAM LGBT adalah negara Vietnam. Vietnam memiliki respon yang dapat dikatakan cenderung berbeda dari negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Pada awalnya Vietnam tidak mengakui keberadaan HAM LGBT secara sosial, dikarenakan memiliki kepercayaan dan kebudayaan yang kuat dari ajaran Konghucu

yang melarang hubungan sesama jenis.⁶ Kondisi kebudayaan seperti ini mengakibatkan masyarakat Vietnam cenderung bersikap *homonegativity*.⁷ Selanjutnya secara politik keberadaan HAM LGBT merupakan isu yang berasal dari barat hal ini bertentangan dengan identitas Vietnam sebagai negara komunis yang pada dasarnya memiliki sikap tertutup dari pengaruh luar negeri. Menurut World Values Survey mengenai *homonegativity attitude toward same-sex sexualities* menunjukkan 63,6% masyarakat Vietnam mengindikasikan bahwa gay dan lesbian tidak benar secara moral.⁸ Dalam survei yang sama juga dijelaskan bahwa kaum perempuan Vietnam lebih bersikap menolak dari pada kaum pria.⁹ Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat Vietnam masih cenderung menolak kelompok LGBT dan belum sepenuhnya paham tentang adanya HAM LGBT.

Selain dari sisi kebudayaan, penolakan terhadap HAM LGBT berasal dari pemerintah Vietnam yang dimulai pada tahun 1986. Vietnam menerapkan kebijakan Doi Moi atau kebijakan renovasi ekonomi yang membuka jalan bagi Vietnam untuk terlibat di arena internasional sehingga masyarakat mengetahui isu-isu global termasuk isu-isu LGBT. Selanjutnya pada tahun 2000, Strategi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Vietnam mengeluarkan dokumen yang secara langsung mengaitkan homoseksual dengan HIV/AIDS, sehingga pemerintah dan



⁶ Kevin Hillstrom and Laurie Collier Hillstrom, "Vietnam War Almanac", *The Gale Group, San Francisco* (2001):

⁷ Eric Julian Manalastas et al., "Homonegativity in Southeast Asia: Attitudes toward Lesbians and Gay Men in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam," *Asia-Pacific Social Science Review* 17, no. 1 (2017):26.

⁸ Manalastas et al., *Homonegativity in Southeast Asia: Attitudes toward Lesbians and Gay Men in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam*, 29

⁹ Manalastas et al., *Homonegativity in Southeast Asia: Attitudes toward Lesbians and Gay Men in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam*, 29.

masyarakat mulai melabeli istilah ‘social evils’ untuk kelompok homoseksual karena menganggap kelompok homoseksual sebagai akar penyebaran virus HIV/AIDS. Sehingga pada tahun 1986 pemerintah merevisi UU Pernikahan dan Keluarga Vietnam, yaitu dilarangnya pernikahan sesama jenis, jika dilanggar akan dikenakan denda senilai 500.000 VND.

Pada tahun 2015 pemerintah Vietnam tiba-tiba mengubah pandangannya terhadap isu HAM LGBT ke arah yang accepting. Dimulai dengan merevisi kembali UU Keluarga dan Perkawinan tahun 2000 yang menghapus pelarangan perkawinan sesama jenis. Langkah ini menjadi titik pertama perubahan sikap pemerintah Vietnam dalam isu HAM LGBT. Pada tanggal 1 Januari 2017, pemerintah Vietnam melegalkan penggantian jenis kelamin secara dokumen dengan syarat telah melakukan operasi kelamin. Legalisasi ini menjadi respon penerimaan lainnya dari pemerintah Vietnam yang secara tidak langsung mengakui keberadaan transgender. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2022, Kementerian Kesehatan Vietnam mempublikasikan sebuah dokumen yang berisi pernyataan “Homoseksualitas tidak bisa ‘disembuhkan’, tidak perlu ‘penyembuhan’ dan tidak dapat diubah”. Pernyataan ini bereferensi pada standar kesehatan WHO LGBT yang menghapus LGBT dari kategori penyakit jiwa di tahun 1990.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Vietnam ini tentu menjadi pertanyaan mengapa Vietnam tiba-tiba merubah pandangannya ke arah accepting terhadap komunitas LGBT. Padahal Vietnam menganut ajaran Konghucu yang melarang hubungan sesama jenis serta memiliki paham Komunis yang tertutup pada pengaruh budaya luar



1.2 Rumusan Masalah

jejak kebijakannya mengenai HAM LGBT, negara Vietnam cenderung menolak, seperti dikeluarkannya UU pelarangan pernikahan sesama jenis serta menyebarkan agenda bahwa homoseksual merupakan akar dari epidemi HIV/AIDS yang berujung pada munculnya istilah 'Social Evils' bagi kelompok homoseksual. Secara mengejutkan mengubah pandangannya ke arah yang lebih accepting. Dimulai dari menghapus UU yang diskriminatif terhadap kelompok LGBT sampai mengeluarkan UU yang mengakui HAM LGBT. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Vietnam ini tentu menjadi pertanyaan, dimana secara politik mempunyai satu partai dan berideologi komunis Marxis-Leninis yang identik dengan state centric. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyebab berubahnya kebijakan pemerintah Vietnam mengenai HAM LGBT ke arah yang lebih accepting.

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang diteliti yaitu bagaimana perubahan kebijakan yang terjadi di negara Vietnam mengenai isu HAM LGBT ke arah yang cenderung accepting.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana berubahnya arah kebijakan di negara Vietnam mengenai isu HAM LGBT ke arah yang cenderung accepting.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini menambah pemahaman tentang isu minor global terkait kemanusiaan dan kesetaraan gender dalam kajian Hubungan Internasional.
2. Secara teoritik penelitian menambah dan melengkapi teori yang digunakan sehingga lebih dalam dan terarah
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengaturannya terhadap khususnya HAM LGBT terhadap perubahan kebijakan dalam negeri suatu negara bagi pemerintah, NGO dan para pemerhati HAM.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan komparasi dalam melihat permasalahan terkait judul yang diangkat. Penelitian-penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan landasan dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Referensi tersebut diantaranya:

Referensi pertama adalah tulisan dari Nguyen Van Phuc, dengan judul *“Legal Silence and the Concept of Law Regarding Gay People in Vietnam”*.¹⁰ Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum negara Vietnam terhadap komunitas LGBT mengenai legalitas keberadaan dan hak-hak dasar komunitas LGBT di Vietnam. Dalam artikel ini penulis membandingkan perubahan-perubahan hukum

¹⁰ Nguyen Van Phuc, “Legal Silence and the Concept of Law Regarding Gay People in Vietnam,” *Peace Human Right Governance* 8, no. 1 (2024): 75–102.

yang terjadi di Vietnam dengan revolusi Prancis, dimana perubahan hukum yang terjadi di Prancis tidak memuat mengenai konsensus hubungan suka sama suka antara orang dewasa sehingga hukum tidak terpengaruh oleh norma-norma sosial, hal ini berbeda dengan Vietnam yang hukumnya dipengaruhi oleh unsur norma-norma Konfusianisme sehingga legalitas dan hak dasar komunitas LGBT tergantung kepentingan pemerintah Vietnam.¹¹

Pada artikel ini penulis menarik kesimpulan bahwa secara hukum komunitas LGBT masih mendapatkan bias karena hukum Vietnam masih dipengaruhi oleh norma-norma sosial setempat yang menyebabkan keberadaan komunitas LGBT tergantung kepentingan pemerintah. Perbedaan tulisan di atas dengan tulisan penulis terletak pada instrumen yang diteliti. Di sini penulis akan membahas bagaimana negara Vietnam bisa accepting terhadap LGBT sedangkan secara budaya dan religiusitas secara tidak langsung menolak keberaaan LGBT. Ini berbeda dengan tulisan Nguyen Van Phuc dimana respon penolakan ditinjau dari keadaan hukum negara Vietnam namun pada penelitian ini menemukan adanya perubahan hukum di Vietnam yang lebih accepting terhadap LGBT.

Referensi kedua adalah tulisan dari Pham Quynh Phuong dengan judul “*From Social Evils” to “Human Beings”*: Vietnam’s LGBT Movement and the Politics of Recognition”.¹² Artikel ini menjelaskan tentang pergerakan dalam negeri oleh aktivis atau organisasi non-pemerintah yang ingin merubah pandangan masyarakat terhadap kaum LGBT yang awalnya menganggap LGBT sebagai dalang utama penyebaran

¹¹ Phuc, “Legal Silence and the Concept of Law Regarding Gay People in Vietnam.”

¹² Pham Quynh Phuong, “From ‘Social Evils’ to ‘Human Beings’: Vietnam’s LGBT Movement and the Politics of Recognition,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 41, no. 3 (2022): 422–439.

HIV/AIDS di Vietnam dan dicap sebagai “*social evils*”. Organisasi non-pemerintah tersebut menyuarakan kalau tuduhan tersebut tidak sepenuhnya benar, bisa saja penyebaran virus HIV/AIDS terjadi karena pola hubungan seksual yang salah. Salah satu kampanye mereka adalah pengakuan pernikahan sesama jenis. Pada akhirnya pemerintah merevisi undang-undang pernikahan tahun 2000 dan menghapus kata-kata pelarangan terhadap pernikahan sesama jenis.¹³

Pada artikel ini penulis menarik kesimpulan bahwa organisasi non-pemerintah ini adalah bagian dari gerakan dalam negeri untuk merubah pandangan masyarakat Vietnam yang awalnya melabeli LGBT sebagai “*social evils*” ke arah “*human being*” karena tuduhan negatif pada LGBT tidak sepenuhnya benar. Perbedaan tulisan di atas dengan penulis terletak pada pembahasan yang dibahas. Di sini penulis akan membahas bagaimana pengaruh pergerakan Internasional terhadap perubahan accepting antara pandangan politik dan masyarakat terhadap LGBT. Ini berbeda dengan tulisan Pham Quynh Phuong yang hanya meneliti pergerakan non-pemerintah dalam negeri terhadap LGBT di Vietnam saja.



Referensi ketiga adalah tulisan dari Quan Thuong Pham, dkk dengan judul “*Changing Social Attitudes Towards LGBT In Vietnam*”.¹⁴ Artikel ini lebih membahas LGBT sejak berdirinya organisasi masyarakat sipil pada akhir tahun 2000an yang menyuarakan kesetaraan antara LGBT dan heteroseksual di kalangan masyarakat Vietnam. Salah satu cara untuk meningkatnya representasi LGBT adalah

¹³ Phuong, “From ‘Social Evils’ to ‘Human Beings’: Vietnam’s LGBT Movement and the Politics of Recognition.”

¹⁴ Quan Thuong Pham et al., “Changing Social Attitudes Towards Lgbt In Vietnam,” *Journal of Positive School Psychology* 2022, no. 7 (2022): 785–799, <http://journalppw.com>.

dengan menggunakan media secara substansial. Sumber-sumber media inilah yang menjadi penyebab perubahan sikap sosial terhadap komunitas LGBT di Vietnam selama dekade terakhir, yang ditandai dengan interaksi antara aktivisme sosial, perubahan politik, dan efek media. Artikel ini menemukan bahwa sikap sosial terhadap isu LGBT dalam satu dekade terakhir telah berubah ke arah yang lebih positif dan terbuka pada komunitas ini, yang merupakan wujud normalisasi homoseksualitas. Namun, heteronormativitas masih ada seiring dengan normalisasi homoseksualitas di Vietnam.¹⁵

Pada artikel ini penulis menarik kesimpulan bahwa kesetaraan LGBT setelah berdirinya organisasi masyarakat sipil pada akhir tahun 2000an yaitu berfokus pada media secara substansial. Hal ini yang membuat perubahan sikap sosial terhadap komunitas LGBT di Vietnam selama dekade terakhir. Perbedaan tulisan di atas dengan penulis terletak pada ruang lingkup pembahasan yang dibahas. Di sini penulis akan membahas beberapa pengaruh signifikan yang membuat pemerintah dan masyarakat Vietnam lebih *accepting* ke LGBT selama dekade ini. Sedangkan penelitian dari Quan Thuong Pham, *et al* lebih mengerucut ke peran media sebagai penyebab utama progresifnya pemerintah dan masyarakat terhadap LGBT.

Referensi keempat adalah tulisan dari Nguyen dan Cao dengan judul “The Development Of The LGBT Community In South East Asia”. Artikel ini lebih membahas bagaimana komunitas LGBT tumbuh di negara-negara Asia Timur. Pembahasan ini dimulai dengan diubahnya Undang-undang pernikahan sesama jenis

¹⁵ Quan Thuong Pham et al., “Changing Social Attitudes Towards Lgbt In Vietnam,” *Journal of Positive School Psychology* 2022, no. 7 (2022): 785–799

pada bulan November Tahun 2015 dikawasan Asia Timur yang digambarkan sebagai sebuah revolusi untuk bertindak dan mendorong masyarakat untuk come out. Masyarakat merayakan hari itu bukan hanya untuk komunitas mereka tetapi juga untuk negara yang lebih ramah dan toleran. Saat ini, media menjadi peranan penting dalam mengubah opini publik. Reality show dan game show dimeriahkan dengan kehadiran orang-orang transeksual, gay, atau lesbian, yang memiliki pengalaman mengekspresikan diri dan memperjuangkan LGBT. Tulisan ini juga membandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang belum sepenuhnya accepting terhadap LGBT.

Pada artikel ini penulis menarik kesimpulan bahwa Negara Asia Timur mayoritas sudah menerima keberadaan LGBT jika dibandingkan dengan Negara di kawasan Asia Tenggara. Peran media sangat berpengaruh terhadap pengakuan LGBT di kawasan Asia Timur. Perbedaan tulisan di atas dengan penulis terletak pada objek penelitian yang dibahas. Di sini penulis akan memfokuskan penelitian mengenai diterimanya LGBT pada Negara Vietnam. Sedangkan penelitian dari Nguyen dan Cao lebih luas dalam objek penelitian yaitu membahas penerimaan LGBT di negara-negara kawasan Asia Timur dan dibandingkan dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Referensi kelima adalah tulisan dari Minh-Thy Tyler dengan judul “*Exploring the Influence of Globalization and Self-Expression in Shaping the Vietnamese LGBT Community in Urban Vietnam*”.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang peran globalisasi

¹⁶ Minh-Thy Tyler, “Exploring the Influence of Globalization and Self-Expression in Shaping the Vietnamese LGBT + Community in Urban Vietnam” (2023).

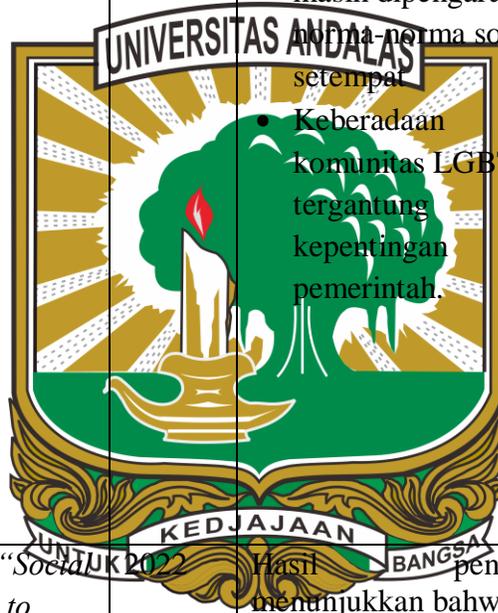
terhadap komunitas LGBT yang mulai diakui oleh masyarakat Vietnam. Adanya globalisasi mengakibatkan komunitas LGBT Vietnam terhubung dengan komunitas global, sehingga pada akhirnya dapat merubah identitas diri mereka. Hal ini dikarenakan komunitas LGBT Vietnam mengikuti dan berasimilasi dengan trend fashion global. Keberadaan LGBT dalam hal fashion secara tidak langsung menentang biner gender yang kaku. Selanjutnya komunitas LGBT di Vietnam menemukan cara baru untuk mengekspresikan diri mereka melalui bahasa dan budaya. Hasil observasi penelitian ini pada LGBT yang diwawancarai dan disurvei menyatakan bahwa istilah LGBT dalam bahasa Inggris membantu mereka lebih memahami dan mengartikulasikan identitas mereka.¹⁷

Pada artikel ini penulis menarik kesimpulan bahwa globalisasi memberikan ruang sehingga komunitas LGBT di Vietnam dapat mengasimilasi budaya, terutama soal fashion dan ekspresi diri yang mereka tunjukkan. Hal tersebut secara tidak langsung menentang biner gender yang kaku. Perbedaan tulisan di atas dengan penulis terletak pada pembahasan. Di sini penulis berfokus pada sebab apa yang membuat pemerintah dan masyarakat Vietnam berubah ke arah accepting terhadap LGBT. Sedangkan penelitian dari Minh-Thy Tyler lebih terfokus membahas dampak globalisasi pada komunitas LGBT di Vietnam.

¹⁷ Minh-thy Tyler and Minh-thy Tyler, "Exploring the Influence of Globalization and Self-Expression in Shaping the Vietnamese LGBT + Community in Urban Vietnam" Independent Study Project (ISP) Collection. 3660 (2023).

**Tabel 1.2:
Penelitian Relevan**

No	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
1	Nguyen Van Phuc	<i>Legal Silence and the Concept of Law Regarding Gay People in Vietnam</i>	2024	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara hukum komunitas LGBT masih mendapatkan bias. • Hukum Vietnam masih dipengaruhi oleh norma sosial setempat • Keberadaan komunitas LGBT tergantung kepentingan pemerintah. 	<p>Penulisakan membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negara Vietnam bisa menerima /<i>Accepting</i> terhadap LGBT sedangkan secara budaya dan religiusitas secara tidak langsung menolak keberadaan LGBT.
2	Pham Quynh Phuong	<i>From “Social Evils” to “Human Beings”: Vietnam’s LGBT Movement and the Politics of Recognition</i>	2022	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi non-pemerintah ini adalah bagian dari gerakan dalam negeri untuk merubah pandangan masyarakat Vietnam yang awalnya melabeli LGBT sebagai “<i>social evils</i>” ke arah “<i>human being</i>” • Tuduhan negatif pada 	<p>Penulisakan membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh dinamika Internasional terhadap perubahan <i>Accepting</i> antara pandangan politik dan

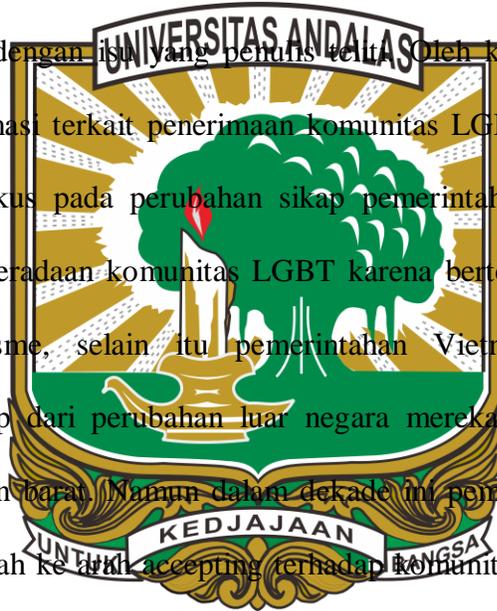


				LGBT tidak sepenuhnya benar.	masyarakat terhadap LGBT.
3	Quan Thuong Pham, dkk	<i>Changing Social Attitudes Towards LGBT In Vietnam</i>	2022	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan LGBT setelah berdirinya organisasi masyarakat sipil pada akhir tahun 2000an yaitu berfokus pada media. <p>Adanya perubahan sikap sosial terhadap komunitas LGBT di Vietnam selama dekade terakhir.</p>	<p>Penulisakan membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh signifikan yang membuat pemerintah dan masyarakat Vietnam lebih <i>Accepting</i> ke LGBT selama dekade ini.
4	Nguyen dan Cao	<i>The Development Of The LGBT Community In South East Asia</i>	2022	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negara Asia Timur mayoritas sudah menerima keberadaan LGBT jika dibandingkan dengan Negara di kawasan Asia Tenggara. • Peran media sangat berpengaruh terhadap pengakuan LGBT di kawasan Asia Timur. 	<p>Penulisakan membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diterimanya LGBT pada Negara Vietnam
5	Minh-Thy Tyler	<i>Exploring the Influence of Globalization</i>	2023	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Globalisasi 	<p>Penulisakan membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah

		<i>and Self-Expression in Shaping the Vietnamese LGBT Community in Urban Vietnam</i>		<p>memberikan ruang pada komunitas LGBT di Vietnam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya proses asimilasi budaya, terutama soal fashion dan ekspresi diri. 	<p>h dan masyarakat Vietnam berubah ke arah <i>Accepting</i> terhadap LGBT.</p>
--	--	--	--	--	---

Sumber: Diolah oleh penulis

Kelima referensi yang penulis tambahkan pada tinjauan pustaka tersebut memiliki keterkaitan dengan isu yang penulis teliti. Oleh karena itu penulis dapat mengumpulkan informasi terkait penerimaan komunitas LGBT di Negara Vietnam. Di sini penulis berfokus pada perubahan sikap pemerintah dan masyarakat yang awalnya menolak keberadaan komunitas LGBT karena bertentangan dengan ajaran Konghucu/Konfusinaisme, selain itu pemerintahan Vietnam menganut paham komunis yang tertutup dari perubahan luar negara mereka, mengingat LGBT ini dibawa dari pandangan barat. Namun dalam dekade ini pemerintah dan masyarakat negara Vietnam berubah ke arah *accepting* terhadap komunitas LGBT yang ditandai dengan kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung menerima komunitas LGBT di Vietnam dan diikuti dengan masyarakat yang mulai menerima keberadaan komunitas tersebut.



1.7 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual nantinya akan membahas kajian intermestik dengan tiga pendekatan utama yaitu pendekatan domestik, pendekatan internasional dan pendekatan transnasional dengan modelnya masing-masing.

1.7.1 Kajian Intermestik

Transnasionalisme adalah sebuah fenomena sosial yang muncul dari kaburnya batas-batas ekonomi dan sosial antar negara dan semakin terhubungnya manusia di semua belahan dunia.¹⁸ Istilah ini pertama kali muncul di awal abad 20 oleh Randolph Bourne yang menyatakan bahwa Transnasionalisme “cara berpikir baru mengenai hubungan antar kebudayaan”. Transnasionalisme merupakan bagian dari proses globalisasi, dalam praktiknya, transnasionalisme merujuk kepada peningkatan integrasi fungsi proses yang bersifat lintas batas atau lintas hubungan individu, kelompok, lembaga, dan mobilisasi di luar batas negara. Individu, kelompok, lembaga, dan negara berinteraksi dengan satu sama lain dalam ruang global baru.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian studi intermestik untuk melihat bagaimana kepentingan dari para aktor domestik dan internasional sebagai pembuat kebijakan. Konsep intermestik muncul seiring dengan meningkatnya fenomena globalisasi dan perluasan jaringan interdependen transnasional atau lintas batas negara merupakan salah satu tanda fenomena globalisasi. Secara khusus, globalisasi menimbulkan tantangan terhadap teorisasi tentang kebijakan publik, namun tantangan tersebut tidak hanya terhadap kebijakan nasional suatu negara akibat referensi global dan jaringan kebijakan global dapat memengaruhi kebijakan nasional itu juga. Oleh karena itu, sulit membedakan bagaimana bentuk kebijakan yang dipengaruhi oleh politik domestik dan bentuk kebijakan yang dipengaruhi oleh politik internasional, karena keduanya saling berkaitan.



¹⁸ Pamela M. Graham, “Reimagining the Nation and Defining The District: Dominican Migration and Transnational Politics” (1999): 91–125.

Kajian perubahan kebijakan ini mengidentifikasi tiga pendekatan berdasarkan unit analisis atau domain perubah kebijakan, yaitu:

- 1) Domestik, dalam pendekatan domestik, perubahan kebijakan menyangkut kepentingan domestik, aktor domestik, dan dalam lingkup domestik. Sebagai contoh dalam pendekatan ini adalah model institusionalis yang berbasis kepentingan institusional, model rasional yang berbasis kepentingan individu, model pluralis yang berbasis kepentingan kelompok, dan model koalisi advokasi yang berbasis sistem kepercayaan. Sedikit berbeda dengan model lain dalam pendekatan domestik. Model koalisi advokasi menggambarkan proses perubahan kebijakan sebagai pembelajaran berkelanjutan antara dua atau lebih koalisi advokasi dalam sub-sistem domestik yang memiliki ide kebijakan yang berbeda berdasarkan keyakinan kebijakan mereka. Mereka mencoba memengaruhi proses perubahan kebijakan agar sesuai dengan keyakinan kebijakan mereka dan dengan sumber daya mereka. Jadi proses perubahan kebijakan tidak hanya proses politik tetapi juga kognitif.
- 2) Dalam pendekatan internasional, perubahan kebijakan digambarkan sebagai kepentingan eksternal dan melibatkan aktor internasional, yaitu negara negara yang lebih maju, donor internasional, dan organisasi internasional. Sebagai contoh dalam pendekatan ini adalah model neorealis (sistemik), model preferensi global (liberalis), dan model strukturalis.
- 3) Pendekatan transnasional, mencakup ide yang berlandaskan pada pengetahuan dan aktor transnasional yang memiliki peran utama dalam proses perubahan



kebijakan. Contoh pendekatan ini adalah model jaringan, model komunitas epistemik, model konstruktivisme, dan model deliberative

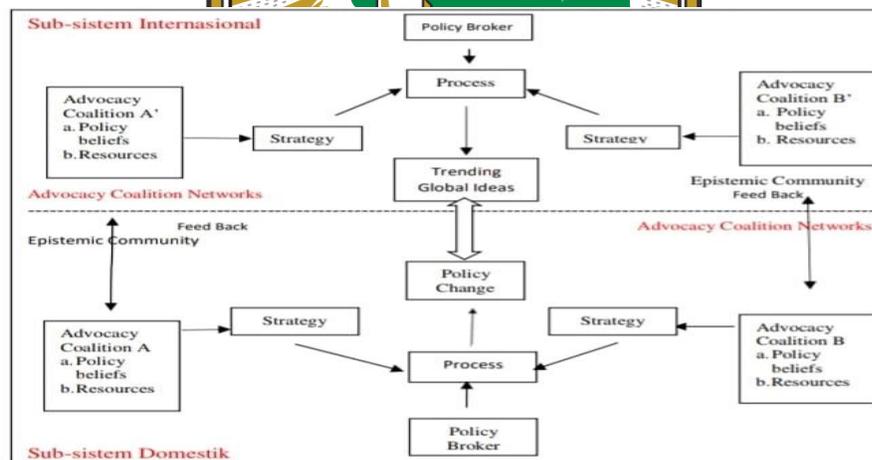
Tabel 1.3
Model dalam Studi Perubahan Kebijakan

Variabel/Model	Aktor/Level Analisis	Proses Perubahan Kebijakan	Faktor yang berpengaruh/ Penting
Pendekatan Domestik			
Institusionalis	Negara	<i>A-politis: decision Making</i>	Kepentingan Nasional/negara, yang didefinisikan oleh elit penguasa
Pluralis	Kelompok, actor bukan Negara	Proses politik: <i>policy making</i>	Kepentingan Kelompok
Sistem	Sistem politik Domestik	Proses Politik: Konversi	Kepentingan system
Pilihan rasional	Aktor Individual; individu, entitas politik	Proses politik: maksimalisasi hasil	Kepentingan individu
Koalisi Advokasi	Sub-sistem	Proses politik dan kognitif: <i>bargaining dan learning</i>	<i>Belief system/ide</i>
Pendekatan Internasional			
Tekanan Eksternal	Sistem politik Internasional	Proses Politik: konflik	Kepentingan negara besar
Preferensi Global	Lembaga-lembaga Internasional	Proses Politik: kerjasama/konsensus	Kepentingan global
Struktural/ Globalis	Kelas global	Proses Politik: konflik/eksploitatif	Kepentingan actor eksternal berbasis kelas/hegemon
Pendekatan Transnasional			
Jaringan (Network)	Aktor Domestik dan Internasional	Proses Politik: konflik, bargaining, dan kerjasama	Kepentingan jaringan
Jaringan Intelektual	Aktor Domestik dan Internasional	Proses Kognitif: learning atau hegemoni	Pengetahuan/ide

Konstruktifis	Aktor Domestik dan Internasional	Proses Kognitif: penerimaan atau penolakan	Norma internasional
Deliberative	Aktor Domestik dan Internasional	Proses social	<i>Discourse</i> dan <i>counter Discourse</i>

Sumber: Dyah Kurniawati, 2012

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan kerangka alternatif yaitu teori perubahan kebijakan model intermestik yang dimodifikasi oleh Dyah Estu Kurniawati dalam bentuk peta konsep. Peta konsep ini membantu penulis untuk memahami pemetaan pro-kontra HAM LGBT di tingkat domestik dan internasional serta jaringan dan pembelajaran sosial yang mereka lakukan. Untuk lebih jelasnya berikut peta konsep perubahan kebijakan model kajian intermestik:



Gambar 1.2 Peta Konsep Teori Perubahan Kebijakan Model Intermestik

Sumber: Dyah Estu Kurniawati, 2020

Alur proses kebijakan menurut peta konsep diatas diawali pada sub sistem internasional, dimulai dari munculnya koalisi advokasi, yaitu kelompok dengan kepentingan ideologi dan sumber daya tertentu dan bertindak sebagai aktor yang

mendorong pembuatan atau perubahan kebijakan. Koalisi advokasi menggunakan strategi dan sumber daya yang mereka memiliki untuk mendorong perubahan kebijakan dengan menjadikan ideologi mereka menjadi *trending global ideas*.

Selanjutnya alur berlanjut pada sub sistem domestik yang juga diawali dengan munculnya koalisi advokasi di tingkat domestik. Koalisi advokasi di tingkat domestik juga akan menggunakan strategi dan sumber daya yang mereka miliki untuk mendorong perubahan kebijakan sesuai dengan ideologi dan *trending global ideas* yang mereka inginkan. Untuk mewujudkan perubahan, advokasi koalisi domestik akan membangun hubungan dengan koalisi advokasi internasional untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang nantinya akan memunculkan jaringan advokasi koalisi. Usaha jaringan advokasi koalisi juga akan didukung oleh kelompok *epistemic community* yaitu komunitas ahli yang memberikan masukan berbasis ilmu pengetahuan dan memberikan umpan balik pada kebijakan. Jaringan advokasi koalisi dalam melakukan dorongan perubahan biasanya di wadahi oleh *policy broker* yaitu aktor yang bertindak sebagai perantara dalam proses kebijakan dan tugas utamanya yaitu sebagai penyeimbang kepentingan berbagai aktor agar proses pembuatan dan perubahan kebijakan berjalan tanpa konflik yang besar. Kolaborasi antara jaringan advokasi koalisi, *epistemic community* dan *policy broker* nantinya akan berujung pada perubahan kebijakan negara.



1.7.2 Teori Advocacy Coalition Framework

Sebagai dampak dari globalisasi, pergerakan ide dan aktor yang semakin lintas batas memiliki peran utama dalam proses perubahan kebijakan dan memberikan peluang bagi pembentukan jaringan aktor baru yang memiliki visi dan

misi yang sama. Koalisi advokasi domestik bertujuan untuk memperjuangkan HAM LGBT agar lebih mudah membuat jaringan dengan funding internasional atau International Non Governmental Organization (INGO) yang mendukung gagasan yang sama dalam membuat jaringan koalisi advokasi transnasional. Keberadaan INGO tersebutlah yang memengaruhi kebijakan pemerintah Vietnam dengan cara mempelajari social learning yang intermestik. Social learning atau pembelajaran sosial memaparkan tentang konstruksi sosial dari masalah kebijakan, ruang lingkup kebijakan, atau tujuan kebijakan. Dengan demikian, untuk menjelaskan proses perubahan sikap pemerintah Vietnam terhadap komunitas LGBT yang bersifat borderless/tanpa batas.

Advocacy Coalition Framework (ACF) adalah sebuah kerangka teoretis yang diperkenalkan oleh Paul Sabatier dan Hank Jenkins-Smith pada akhir 1980-an sebagai respons terhadap keterbatasan model-model kebijakan publik yang terlalu linier dan kurang mampu menjelaskan dinamika kompleks dalam proses perubahan kebijakan.¹⁹ ACF dikembangkan untuk memahami bagaimana aktor-aktor dalam subsistem kebijakan berinteraksi, berkoalisi, dan terlibat dalam proses pembelajaran kebijakan serta perubahan kebijakan dalam jangka panjang. Berbeda dengan model klasik yang mengasumsikan bahwa perubahan kebijakan berlangsung melalui tahapan rasional yang berurutan, ACF menekankan bahwa kebijakan sering kali merupakan hasil dari konflik, keyakinan, dan negosiasi antar koalisi dalam suatu ruang kebijakan



¹⁹ Hank C. Jenkins-Smith and Paul A. Sabatier, "Evaluating the Advocacy Coalition Framework," *Journal of Public Policy* 14, no. 2 (1994): 175–203.

yang lebih dinamis dan berlapis.²⁰ Advocacy Coalition Framework adalah model yang mengasumsikan bahwa dalam setiap policy subsystem (misalnya isu lingkungan, pendidikan, atau energi), terdapat berbagai kelompok aktor yang memiliki belief system atau sistem keyakinan yang relatif stabil.²¹ Aktor-aktor ini membentuk advocacy coalitions atau koalisi advokasi, yakni kelompok yang memiliki nilai inti dan tujuan kebijakan yang serupa.²² Koalisi ini bisa terdiri dari berbagai macam pihak, seperti pejabat pemerintahan, lembaga riset, organisasi non-pemerintah, kelompok kepentingan, media, bahkan akademisi.²³ Mereka bekerja sama dalam memengaruhi arah kebijakan publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, seperti data ilmiah, dukungan publik, atau akses terhadap pengambil keputusan.²⁴

Di dalam sebuah policy subsystem, aktor-aktor yang terlibat tidak dibatasi oleh batas-batas institusional atau formal. Justru, mereka didefinisikan berdasarkan keyakinan bersama dan tujuan kebijakan yang sama.²⁵ Para aktor ini bisa bertindak sebagai pemimpin koalisi, penghubung antar kelompok (*policy brokers*), atau pelaku pembelajaran kebijakan.²⁶ Salah satu asumsi dasar ACF adalah bahwa keyakinan (*beliefs*) terbagi dalam tiga tingkatan: *deep core beliefs* (keyakinan mendalam tentang



²⁰ "IPPA - The Advocacy Coalition Framework," accessed June 10, 2025, <https://www.ippapublicpolicy.org/teaching-ressource/the-advocacy-coalition-framework/7>.

²¹ Paul Cairney, "Chapter 10 - The Advocacy Coalition Framework," in *Understanding Public Policy: Theories and Issues 2nd Edition*, 2019, 1–21, <https://paulcairney.files.wordpress.com/2019/03/chapter-10-acf-upp-2nd-ed-9.3.19.pdf>.

²² Christopher M Weible, "Encyclopedia of Public Policy," *Encyclopedia of Public Policy*, no. July (2023): 0–10.

²³ Weible, "Encycl. Public Policy."

²⁴ Jenkins-Smith and Sabatier, "Evaluating the Advocacy Coalition Framework."

²⁵ Cairney, "Chapter 10 - The Advocacy Coalition Framework."

²⁶ Weible, "Encycl. Public Policy."

hakikat manusia dan nilai dasar), *policy core beliefs* (pandangan tentang kebijakan ideal dan strategi pencapaiannya), dan *secondary beliefs* (pendapat teknis yang lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan).²⁷ Perubahan kebijakan dapat terjadi jika terjadi pergeseran pada salah satu atau lebih tingkat keyakinan ini, khususnya di tingkat *policy core* dan *secondary*. ACF dirancang untuk menganalisis proses kebijakan yang berlangsung dalam jangka panjang, umumnya lebih dari satu dekade.²⁸ Hal ini karena perubahan kebijakan besar sering kali tidak terjadi secara cepat atau linier, melainkan melalui dinamika yang kompleks, termasuk konflik, negosiasi, dan pembelajaran kebijakan.²⁹ Oleh karena itu, ACF sangat relevan dalam konteks isu-isu kebijakan yang bersifat kontroversial dan berlangsung dalam waktu panjang, seperti perubahan iklim, kebijakan energi, atau pengelolaan air.

Proses analisis dalam ACF dimulai dari identifikasi subsistem kebijakan tertentu, lalu memetakan aktor-aktor yang terlibat dan sistem keyakinan yang mereka anut. Dari situ, dapat dikenali koalisi-koalisi yang terbentuk berdasarkan kesamaan keyakinan. ACF juga menelaah bagaimana koalisi tersebut menggunakan sumber daya yang mereka miliki misalnya otoritas hukum, akses terhadap pembuat kebijakan, opini publik, atau data ilmiah untuk memengaruhi kebijakan. Perubahan kebijakan dapat terjadi melalui beberapa jalur: adanya gangguan eksternal (seperti krisis ekonomi atau bencana), konflik internal dalam subsistem, proses pembelajaran kebijakan, atau kebuntuan antara koalisi yang mendorong negosiasi. ACF dengan



²⁷ Paúl Cisneros, "The Advocacy Coalition Framework Research Program: An Overview," *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, no. March (2021).

²⁸ Jenkins-Smith and Sabatier, "Evaluating the Advocacy Coalition Framework."

²⁹ Jenkins-Smith and Sabatier, "Evaluating the Advocacy Coalition Framework."

demikian memungkinkan kita memahami bahwa stabilitas dan perubahan kebijakan bukanlah hasil dari satu variabel tunggal, melainkan dari interaksi kompleks dalam jangka panjang antar aktor dan sistem keyakinan mereka.

1.8 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian nantinya akan membahas pendekatan dan jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dalam mengumpulkan data dari sumber ilmiah yang dimana bermaksud untuk memahami isu yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan alat-alat statistik namun lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut, selain itu analisis ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif dimana penulis akan mendeskripsikan fakta yang didapatkan secara lebih rinci dan kemudian diberikan penjelasan terkait hal tersebut sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis karena akan menjelaskan bagaimana perubahan sikap pemerintah dan masyarakat Vietnam yang awalnya menolak berubah ke arah accepting terhadap komunitas LGBT di Vietnam.

1.8.2 Batasan Masalah

Pemberian batasan masalah berfungsi untuk mengarahkan penelitian agar lebih jelas dan spesifik sehingga dapat lebih difokuskan kepada pokok

permasalahannya. Pada penelitian ini dilakukan dengan pengamatan data dimulai pada tahun 2013-2022, hal ini dikarenakan dalam konsep ACF menyarankan untuk penggunaan desain penelitian longitudinal mengingat penelitian membahas mengenai perubahan ideologi, dinamika politik, dan hasil kebijakan. Penulis membatasi objek penelitian hanya di Negara Vietnam, hal ini didasarkan pada perubahan sikap negara Vietnam yang merubah pandangannya terhadap komunitas LGBT. Selain itu, fokus penelitian berdasarkan kajian intermestik yang membahas faktor-faktor hubungan dinamika terhadap berubahnya kebijakan pemerintah Vietnam terhadap komunitas LGBT.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah unit yang perilakunya hendak diteliti, dijelaskan, dan atau diramalkan. Pada penelitian ini unit analisisnya adalah negara, dengan variabel dependennya adalah kebijakan pemerintah Vietnam. Unit eksplanasi adalah objek yang memengaruhi perilaku unit analisis dan pada penelitian ini unit eksplanasinya adalah perubahan kebijakan pemerintah Vietnam terhadap komunitas LGBT di Vietnam. Sedangkan tingkat analisis atau level analisis merupakan acuan posisi dari unit yang akan diteliti. Pada penelitian ini tingkat analisisnya yaitu negara, hal tersebut dikarenakan penelitian ini berfokus kepada analisis dari perilaku negara yaitu tindakan pemerintah Vietnam yang memilih untuk melakukan perubahan kebijakan publik terhadap komunitas LGBT di Vietnam ke arah yang lebih accepting.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis memilih untuk menjadikan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode penelitian untuk mencari



seluruh data terkait isu yang diteliti melalui bahan bacaan seperti buku yang berjudul “Queer Southeast Asia by Tang & Wijaya”, dokumen, arsip berupa *report* dari ILGA “Dare to dream: the ongoing voyage from invisibility to community empowerment, and foray into the region for LGBTQ in Vietnam”, Berita The Diplomat “Vietnam takes major step forward in recognizing LGBT rights”. Berikut tabel daftar bacaan yang menjadi sumber data penulis

Tabel 1.4
Daftar Sumber data

Judul	Pengarang/sumber	Jenis
Navigating Constraints: Activist Strategies in the Vietnamese LGBT Movement	Yên Mai	Artikel Jurnal
"Is it because I am LGBT?" Discrimination based on sexual orientation and gender identity in Viet Nam"	Huy Truong dan Phuong Pham	Report
Stonewall : the definitive story of the LGBTQ rights uprising that changed America	Martin B. Duberman	Artikel Jurnal
"I Do" Campaign Celebrate 10 Years Advocating LGBT Rights	Vietnam Times: Valerie Mai	Portal Berita
Vietnam Takes Major Step Forward in Recognizing LGBTQ Rights	The Diplomat: Sebastian Strangio	Portal Berita
'Yogyakarta Principles' a Milestone for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender	Human Right Watch	Portal Berita/Laporan

Rights		Jurnalis
Viet Nam seeks international experiences against LGBT discrimination	UNDP: Yaumil	Artikel Badan resmi
The Same-Sex Marriage From The International Laws And Recommendations For Vietnamese Legal Regulations	Nguyen Thi, Bao Anh, dan Nguyen Thu Huong	Jurnal Artikel
Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia	Eva Hansson dan Meredith L. Weiss	Buku

Sumber: Diolah Peneliti

Dan masih banyak lagi menggunakan artikel dan report resmi dari NGO domestik Vietnam seperti iSEE dan ICS Center. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencari dan menganalisis bahan bacaan dan sumber informasi yang didapatkan.³⁰

1.8.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono teknik analisis data menjelaskan bahwa teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan. Pada penelitian data dianalisis dari kajian intermestik dengan dua subsistem utama yaitu subsistem international dan subsistem domestik kemudian pada kedua sub-sistem tersebut nantinya akan ada peran dari beberapa aktor kunci yang berperan pada perubahan kebijakan negara Vietnam terhadap komunitas LGBT. Aktor yang dimaksud adalah:

³⁰ Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi."

1. *Advocacy Coalition Networks* yaitu jaringan koalisi yang terdiri dari kelompok dengan kepentingan dan sumber daya tertentu dan bertindak sebagai aktor yang mendorong pembuatan atau perubahan kebijakan, sebagai contoh aktor ini adalah *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association (ILGA)* dan *Astraea Lesbian Foundation for Justice* dimana aktor ini berperan memperjuangkan HAM LGBT di Vietnam yang dilandaskan oleh pernyataan dari WHO serta turut melakukan sosialisasi politik ke pemerintah dan mengorasionkan bahwa LGBT juga manusia dan berhak atas HAM mereka.

2. *Belief System*, yaitu asumsi dasar ACF: *deep core beliefs* (keyakinan mendalam tentang hakikat manusia dan nilai dasar), *policy core beliefs* (pandangan tentang kebijakan, ideal dan strategi pencapaiannya), dan *secondary beliefs* (pendapat teknis yang lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan).³¹ Perubahan kebijakan dapat terjadi jika terjadi pergeseran pada salah satu atau lebih tingkat keyakinan ini, khususnya di tingkat *policy core* dan *secondary*.

3. *Epistemic Community* yaitu komunitas ahli yang memberikan masukan berbasis ilmu pengetahuan dan memberikan umpan balik pada kebijakan sebagai contoh aktor ini adalah kaum intelektual dari negara Vietnam itu sendiri yang menempuh pendidikan diluar negeri serta berhasil menyerap budaya asing sehingga pola fikir mereka lebih *open minded* terhadap suatu perbedaan seperti perbedaan orientasi seksual pada komunitas LGBT.

³¹ Cisneros, "The Advocacy Coalition Framework Research Program: An Overview."

Jika dijabarkan secara singkat perubahan kebijakan negara Vietnam dari kebijakan lama yang awalnya menolak keberadaan kaum LGBT karena dianggap sebagai “penyakit jiwa” menuju ke arah yang cenderung toleran dan accepting. Analisa perubahan akan diawali dengan mengumpulkan informasi bagaimana HAM LGBT muncul dan menjadi suatu trending global ideas, selanjutnya mengumpulkan data bagaimana ide HAM LGBT mulai masuk ke Vietnam sehingga memunculkan koalisi advokasi pro-HAM LGBT di Vietnam. Selanjutnya penulis akan menganalisa bagaimana interaksi antara advokasi koalisi domestik dengan internasional akan menyebabkan berubahnya kebijakan Vietnam terhadap HAM LGBT.

1.9 Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Bagian ini membahas mengenai latar belakang dari penelitian, menemukan rumusan masalah, menentukan pertanyaan penelitian, menjabarkan kerangka konseptual yang digunakan, metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, batasan masalah, tingkat dan unit analisis, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan data dan analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II Ide Global HAM LGBT dan Respon Vietnam

Pada bagian ini akan membahas perkembangan komunitas LGBT sehingga menjadi sebuah ide global sampai pada awal mula dikenalnya HAM LGBT ke Vietnam.



BAB III Konflik dan Dinamika ide di Vietnam Terkait Isu HAM LGBT

Pada bagian ini akan memaparkan peran kebijakan pemerintah Vietnam yang baru setelah dahulunya menolak komunitas LGBT atau merubah kebijakan ke arah accepting terhadap komunitas LGBT

BAB IV Analisis Perubahan Kebijakan Pemerintah Vietnam yang accepting Terhadap Komunitas LGBT

Bab ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh aktor-aktor Internasional yang mampu merubah sikap penolakan menjadi accepting dari pemerintah Vietnam terhadap keberadaan komunitas LGBT di Vietnam.

BAB V Kesimpulan

Pada bagian terakhir dari tulisan ini akan ditarik sebuah kesimpulan, kekurangan penelitian, saran terkait penelitian, daftar pustaka dan lampiran.

